



KORAN	HAL
Haluan	20
Padang Ekspres	
Singgaling	
Pos Metro	

Tanggal	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
---------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----

Bulan	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
-------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

LIMA TAHUN EMBAN AMANAH

DPRD Sawahlunto 2014 - 2019 Tetapkan 80 Perda

EMBAN amanah sejak 12 Agustus 2014 lalu, 20 anggota DPRD Sawahlunto telah mengesahkan 79 rancangan peraturan daerah (Raperda) menjadi Perda. Terakhir pekan kedua Juni lalu, para legislator Kota Arang itu, mengesahkan Laporan Pertanggung Jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (LPJP APBD) Tahun 2018.

Mulai Agustus hingga akhir 2014, DPRD Sawahlunto menetapkan 9 Perda, sepanjang 2015 terdapat 17 Perda. Kemudian 2016 ditetapkan 19 Perda, sedangkan 2017 dan 2018 masing-masing 14 Perda. Sementara hingga Juni 2019, telah ditetapkan 6 Perda. Dengan demikian, sejak dilantik DPRD Sawahlunto periode 2014 - 2019 telah menetapkan 79 Perda.

Jika tidak ada aral melintang Raperda APBD Perubahan Sawahlunto 2019, yang direncanakan 'tokok palu' akhir Juli ini, akan menjadi Perda ke 80, atau pekerjaan terakhir bagi 20 wakil rakyat yang berasal dari 8 partai politik tersebut.

Melihat total Perda yang ditetapkan tersebut, DPRD Sawahlunto di bawah pimpinan Adi Ikhibar bersama Weldison dan Hashihomi itu,

DPRD Kota Sawahlunto. Ketiganya yakni, Perda nomor 16 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Bimbingan Hukum, yang ditetapkan 23 Desember 2015.

Selanjutnya Oktober 2017, dewan kembali menetapkan Perda nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD Sawahlunto. Berselang dua bulan, melalui inisiatifnya dewan kembali menetapkan Perda nomor 11 tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Inkuisitif.

Tidak berbeda jauh, Wakil Ketua DPRD Sawahlunto Hashihomi, SY dan Weldison mengungkapkan, sebagian besar Perda merupakan turunan dari aturan pemerintah pusat. Sehingga dibutuhkan respon pemerintah menanggapi aturan-aturan yang dikeluarkan pusat.

"Kami melihat pemerintah tanggap dalam merespon perkembangan peraturan pusat. Sebab Perda ini merupakan turunan dari aturan yang ada di pusat, yang disusun dan ditetapkan pemerintah daerah bersama dewan," ujar Hashihomi.

Dengan total 79 Perda yang telah ditetapkan itu, Hashihomi berharap

DPRD Sawahlunto terbelang produktif. Hal itu tentu tidak terlepas dari dukungan kebijakan pemerintah daerah, yang menjadi pengusul lahirnya Rancangan Perda.

Beberapa isu nasional yang direpson langsung pemerintah daerah dengan mengusulkan Rancangan Perda diantaranya, Perda tentang Pemilihan Kepala Desa, Etika Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, termasuk Perda tentang Badan Usaha Milik Desa (BUMDes).

Bagi pria yang sudah tiga periode menjadi wakil rakyat, dan pernah menjadi wakil ketua maupun ketua DPRD Sawahlunto itu, atas usulan pemerintah maupun inisiatif dewan, DPRD Sawahlunto tentu akan membahasnya dengan sebaik mungkin dan menghasilkan Perda yang sesuai dengan aturan yang lebih tinggi.

"Baik itu Perda yang terkait dengan kebutuhan pengelolaan pemerintah daerah, maupun Perda yang terkait dengan kebutuhan masyarakat. Dewan tentunya juga merespon untuk membahas, mengkaji dan menentukannya," tambah Bapak empat anak itu.

Hashihomi berharap



PIMPINAN DPRD dan Walikota Sawahlunto

kan, ke depan dewan lebih selektif dalam menyikapi peraturan daerah yang ada, serta mendorong pemerintah dalam menerapkan Perda yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan para penegak Perda.

Bagi Ketua Pertina Sawahlunto itu, sangat perlu peningkatan dalam penerapan serta pengawasan oleh instansi terkait. Sebab, Perda yang telah ditetapkan menjadi tugas dari dinas terkait.

Dalam dua pekan ke depan, DPRD Sawahlunto periode 2014 - 2019 telah melakukan pembahasan yang sangat alot terkait APBD Perubahan Kota Sawahlunto 2019.

Sekretaris DPRD Kota Sawahlunto, Dedi Ardona, mengatakan dalam perencanaan APBD Perubahan Kota Sawahlunto 2019, akan ditetapkan menjelang masa tugas DPRD Kota Sawahlunto 2014 - 2019 berakhir.

"Mudah-mudahan sesuai dengan rencana yang ada, Raperda APBD Perubahan Sawahlunto 2019 akan selesai dan ditetapkan sebelum awal Agustus 2019," pungkasnya. (h/adv)



RAPAT Paripurna DPRD Sawahlunto



PIMPINAN DPRD Kota Sawahlunto